

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN**

Marvel Steven Fallo
NPP. 31.0794

*Asdaf Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Keuangan Publik*

Email : marvelsteven17@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Andi Fitri Rahmadany, M. S.IP., M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research focuses on village financial management, where there are many cases of misuse of village finances and delays in financial reporting. **Purpose:** The aim of this research is to find out how village financial management improves village financial accountability, the supporting and inhibiting factors for village financial management, and to find out the efforts made to improve village financial management. **Method:** This research uses ancient management theory 2021, descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusions. **Result:** The findings of the research conducted show that village financial management in South Central Timor Regency has begun to be accountable and transparent. Village financial management is carried out using the Village Financial System (Siskeudes) application, which is a breakthrough in village financial management in increasing accountability and transparency. Village financial management can run well if there is good cooperation and communication between financial managers in the village and supervisors and empowerers in the district. **Conclusion:** In its development, communication and improvement of village financial management has been carried out with the Village Financial System (Siskeudes) application. There needs to be cooperation and firmness from the financial management apparatus as well as supervisors and managers who must be able to fulfill needs, not desires, let alone interests.

Keywords: Financial Management, Accountability, Siskeudes

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keuangan desa, dimana banyaknya kasus penyalagunaan keuangan desa serta keterlambatan pelaporan keuangan. **Tujuan:** Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan purba 2021, penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah mulai akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan terobosan dalam pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan desa dapat berjalan

dengan baik apabila adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar pihak pengelola keuangan di desa dan pihak pengawas dan pemberdaya yang ada di kabupaten. **Kesimpulan:** Dalam pengembangannya sudah dilakukan komunikasi dan peningkatan pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Perlu adanya kerjasama dan ketegasan dari aparatur pengelolaan keuangan serta pengawas dan pengelola harus dapat memenuhi kebutuhan bukan keinginan apaalagi kepentingan.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Siskeudes

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini memprioritaskan pembangunan desa karena undang-undang desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan perbatasan serta tak berfokus di Pulau Jawa saja, salah satunya melalui dana desa. Desa diberikan sejumlah sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah juga merancang berbagai aturan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan keuangan desa yang efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Melihat jumlah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa. kemudian dalam rangka untuk mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Aturan ini bertujuan agar supaya anggaran desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai dengan evaluasinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan menyatakan bahwa Kabupaten TTS tahun 2023 mendapatkan total dana desa sebesar Rp243.618.378.000 dan Alokasi dana desa tahun 2023 sebesar Rp89.850.480.734 dan mendapatkan alokasi dana desa terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena disesuaikan dengan jumlah desa sebanyak 266 Desa. Implementasi pengalokasian dana desa besarnya dana desa di tiap desa Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai 200 lebih juta setiap bulannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

besarnya jumlah anggaran dana desa di kabupaten Timor Tengan Selatan yang diterima setiap desa setiap bulannya adalah 200 juta. Besarnya jumlah anggaran ini justru memberikan potensi besar dan ancaman dalam pengelolaan keuangan desa. Desa dituntut untuk dapat mengolah keuangan desa dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasinya selama 5 tahun terakhir terjadi begitu banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dihimpun dari berita yang bersumber dari kupang tribun news.com masih banyaknya kasus penyalagunaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Bapak Chris Tlonaen dalam suaratts.com menyatakan bawa pengelolaan keuangan desa perlu dibenahi karena masih banyaknya penyalagunaan dan laporan yang belum tepat di desa. Adanya penyelewengan pengelolaan keuangan desa diantaranya ketidaksesuaian jumlah belanja desa dengan anggaran yang ditetapkan.

Kasus penyalagunaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi dan golongan. Maraknya kasus penyalagunaan yang terjadi di kalangan pemerintah desa Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi salah satu masalah yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh kepala desa saja melainkan dilakukan dengan perangkat desa terkait. Keduanya bekerjasama dalam menggelapkan dana desa. Kades dan Sekdes Mnelapetu TTS Tak Patut Dicontohi Keduanya Ternyata Makan Dana Desa. (2020, April 8). Diakses pada Oktober 24, 2023 dari berita online: <https://kupang.tribunnews.com/2020/04/08/kades-dan-sekdes-mnelapetu-tts-ini-tak-patut-dicontohi-keduanya-ternyata-makan-dana-desa-berapa>

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepala desa. Masih banyak desa di kabupaten Timor Tengah Selatan yang belum atau terlambat menyampaikan laporan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan 6 Maret 2023 baru menerima 38 desa yang sudah memposting APBDes tahun 2023 dari 266 desa, sisanya masih dalam tahap penyelesaian SPJ dan tahapan paramungun RKPDes ditingkat desa. Padahal target yang diharapkan adalah akhir bulan maret sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut untuk tahapan pembuatan RKPDes baru 58 desa dan RAB fisik sudah mencapai 126 desa dari jumlah total 266. Sedangkan hingga awal mei 2023 masih ada juga desa di kabupaten Timor Tengah Selatan yang belum mencairkan dana desa tahap 1 sejumlah 18 desa. Hal ini dikarenakan 18 desa belum melakukan posting sehingga belum bisa melakukan pencairan dana desa. Selain itu masih banyak desa yang belum menyelesaikan SPJ pengelolaan dana desa tahun 2022. Hingga bulan mei 2023 masih ada 100 desa yang belum menyetorkan SPJ tahun 2022 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sejumlah berita terkait pengelolaan keuangan desa penulis menyimpulkan ada berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: Ketidaksesuaian belanja desa, Penyalagunaan keuangan desa, SDM aparatur Desa, Keterlambatan SPJ dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan Kurangnya koordinasi serta kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terinspirasi dan didukung dengan berbagai penelitian terdahulu dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Mutia Basril (2020) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor yang mempengaruhi, berdasarkan metode kuantitatif (kuisioner) menyimpulkan Transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu. Penelitian yang dilakukan Riswati (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan metode deskriptif kualitatif menyimpulkan dalam pengelolaan keuangan desa dengan permendagri sudah berjalan dengan baik tanpa hambatan dan perlu adanya pendampingan dan bimbingan serta Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan mutu SDM. Penelitian yang dilakukan Faizah & Sari 2022 dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Bunyudono Kecamatan Dukun dengan metode deskriptif kualitatif menyimpulkan dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi sangat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan asas akuntabilitas dan transparansi namun dalam pengelolaannya masih terhambat oleh kualitas SDM perangkat desa dan sistem yang terkadang mengalami gangguan. Penelitian yang dilakukan Ridwan (2019) dengan judul Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam dengan metode kualitatif menyimpulkan penggunaan aplikasi dalam

pengelolaan keuangan desa memberikan dampak yang besar terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan desa dan dibutuhkan peran yang besar dalam peningkatan pengelolaan keuangan desa. (Masihad, 2018) menyimpulkan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa sangat dibantu dengan adanya aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). penelitian yang dilakukan (Atintyasputri, 2019) tentang analisis implementasi dana desa menemukan aplikasi siskeudes dapat dijadikan sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa. penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019) menyimpulkan masih perlu perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan dan kursus. Penelitian yang dilakukan (Ngakil & Kaukab, 2020) tentang akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa menyimpulkan kegiatan keuangan yang dilakukan harus adanya kesesuaian antara kegiatan dan prosedur pengelola keuangan. Pendapat (Kecamatan Bengkalis Muhammad Luthfi Iznillah et al., n.d.) tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada permendagri yang berlaku dan dilakukan menyeluruh di pihak desa. Penelitian yang dilakukan Afriansayah (2022) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong) dengan metode kualitatif deskriptif menyimpulkan kapabilitas pemerintahan desa dan sistem manajemen internal yang baik dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat novelty pada penelitian ini dimana penulis ingin melihat besarnya dana desa yang diberikan 200 juta setiap bulannya kepada satu desa apakah memberikan dampak atau justru hanya masalah. Penulis ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta dikaitkan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Penulis juga ingin meneliti apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa serta bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penulis juga ingin melihat pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dengan penggunaan teori sebagai alat ukur dalam melakukan penelitian.

1.5 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah Mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengetahui apa saja faktor penghambatan dan pendukung Pengelolaan Keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengetahui apa saja upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

II. METODE

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam kajian ini adalah pendekatan secara kualitatif menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden. (Sugiyono, 2019) mengemukakan “metode penelitian kualitatif atau disebut sebagai metode pospositivistik sebab dilandaskan pada filsafat postpositivisme”. Pelaksanaan metode berdasarkan situasi yang wajar sehingga dianggap menjadi matriks yang kondusif serta interperetative ditinjau berdasarkan kenyataan sosial dengan sifat dinamis, kompleks untuh dan memiliki makna serta relasi gejala interaktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan penulis melakukan wawancara pada 10 informan yang telah ditetapkan. Informan yang ditetapkan diantaranya adalah kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabid Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD, Kasubag Keuangan Dinas PMd serta 7 desa yang ditetapkan sebagai informan untuk mendapatkan data. (Sugiyono, 2019) mengemukakan “Teknik sampling adalah merupakan Teknik pengambilan sampel, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling”. Dalam penulisan penulis menggunakan Teknik snowball sampling. Penulis menggunakan snowball sampling dimana teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menentukan beberapa orang yang ahli dalam bidangnya selanjutnya menambahkan sampel lain untuk melengkapi data yang diberikakan sehingga dapat mendukung tujuan penelitian dengan cara yang lebih efektif dan relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

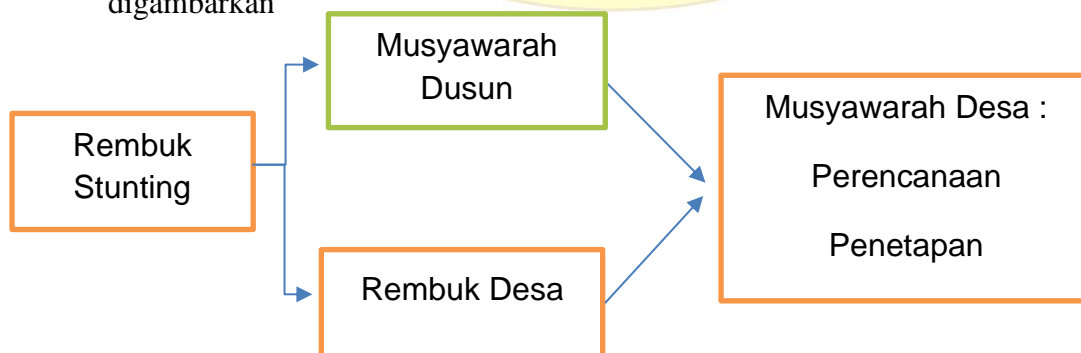
Penulis melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. penulis menggunakan teori pengelolaan keuangan purba (2021) dalam menjawab permasalahan yang ditemui di lapangan

3.1 pengelolaan keuangan desa

pengelolaan dana desa di kabupaten Timor Tengah Selatan diantaranya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa di kabupaten Timor Tengah selatan meliputi :

1. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjalan di setiap desa. Perencanaan dimulai dari proses rembuk stunting dimana disatukan berbagai aspirasi dari masyarakat desa kemudian dilanjutkan dengan musyawarah dusun di setiap desa dimana digali aspirasi dari setiap masyarakat desa berdasarkan dengan kebutuhan dalam dusun misalnya jalan, air, dsb. Selanjutnya hasil musyawarah dusun disatukan kedalam musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai program pemerintah desa dan sebagai pengeluaran desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa perlu memperhatikan program prioritas desa yang mana harus memuat ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, kesehatan (fasilitas kesehatan) dan program penunjang/fisik contohnya rutilahu (rumah tidak layak huni). Secara singkat tahap perencanaan dapat digambarkan



ketentuan yang harus dipenuhi desa.

Tabel 4 1
Dokumen Aksistensi Desa

No	Desa	Data Rincian Kelengkapan Dokumen RKPDes Tahun 2024	Keterangan	Ket
1		Berita Acara Hasil Verifikasi RKPDes oleh tim kecamatan	Ada	Tdk
2		Berita acara kesepakatan bersama antara BPD/ Kades	Ada	Tdk
3		Berita acara penetapan nama penerima BLT	Ada	Tdk
4		Berita acara hasil penetapan prioritas program kegiatan tahunan	Ada	Tdk
5		Berita acara pelaksanaan Musdes/ daftar hadir/ undangan/ norulens hasil rapat	Ada	Tdk
6		Berita acara hasil survey harga barang/ data hasil survey harga barang	Ada	Tdk
7		Berita acara hasil survey lokasi kegiatan/ rencana program kegiatan 2024	Ada	Tdk
8		Berita acara review RPJMDes/ bagi desa yang mengakhiri masa tugas tahun 2024	Ada	Tdk
9		Peraturan desa tentang RKPDes/ peraturan desa terkair RPJMDes 2022-2028	Ada	Tdk
10		Surat rekomendasi oleh dinas teknis tentang standarisasi harga tahun 2024	Ada	Tdk
11		SK Kepala Desa tentang penunjukan/ penetapan tim pelaksanaan kegiatan (TPK)	Ada	Tdk
12		SK Kepala Desa tentang Penunjukan tim penyusun RKPDes tahun 2024	Ada	Tdk
13		SK Kepala Desa tentang penetapan tim penyusun RPJMDes dan tim penyusun RKPDes	Ada	Tdk
14		SK Kepala Desa tentang nama penerima bantuan langsung tunai/ BLT	Ada	Tdk
15		SK Kepala Desa tentang TKD/ Kader Posyandu KPM/ RT/ RW/ Guru PAUD	Ada	Tdk
16		SK Kepala desa tentang penetapan keg. Pelatihan bagi POKMAS	Ada	Tdk
17		SK Ketua BPD tentang persetujuan atas rencana RKPDes 2024	Ada	Tdk
18		Dokumen rencana anggaran biaya (RAB Pemberdayaan dan Program Fisik)	Ada	Tdk
19		Daftar usulan RKPDes dan pagu indikatif desa tahun anggaran 2024	Ada	Tdk
20		Matriks rencana pemerintah desa tahun 2024	Ada	Tdk
21		Proposal teknis keg. Program fisik/ program pemberdayaan masyarakat/ SK penerima	Ada	Tdk
22		Foto/ dokumentasi hasil kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat tahun 2023	Ada	Tdk
23		RPJMDes bagi 180 Kepala Desa yang sudah dilantik tahun 2022	Ada	Blm
24		Data soft copy (RPJMDes, RKPDes/ RAB Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat	Ada	Blm
25		Laporan konvergensi stunting tahun 2023	Ada	Tdk

sumber : Dinas PMD 2024

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses mengatur segala aktifitas pengelolaan keuangan. Proses ini mencakup pembagian tugas dan tanggungjawab pengelolaan keuangan. Pengorganisasian juga mencakup kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan keuangan. Pihak pengelolaan keuangan desa di kabupaten Timor Tengah Selatan sudah ditetapkan di setiap desa. Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan seluruhnya sudah memiliki

perangkat desa dalam pengelolaan keuangan. Bapak Kepala Desa Noemeto mengatakan bahwa perangkat desa kami sudah lengkap ditambah lagi sudah bergelar serjana. Hal ini serupa dengan dikatakan oleh 6 desa lainnya.

3. Pengaraham

Pengarahan atau pengendalian laporan keuangan adalah tahap penting yang mencakup aktifitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Dalam proses pengarahan kegiatan keuangan berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengarahan mencakup 2 aspek yaitu proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. proses pelaksanaan dan penatausahaan merupakan lanjutan dari proses perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa.

4. Pengendalian Kegiatan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah segala bentuk tindakan dalam bentuk dokumen yang disampaikan kepala desa kepada pemerintah Daerah melalui Camat selaku pembina. Kepala desa menyusun laporan yang disampaikan setiap semester berisi laporan pelaksana APB Desa dan laporan Realiasi Kegiatan. Laporan ini akan dinilai sejauh mana pelaksanaan APB desa dan kegiatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa sekaligus bukti pelaksanaan anggaran pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Laporan keuangan desa harus memuat semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di desa berdasarkan perencanaan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di desa berdasarkan perencanaan.



3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 4 2

Faktor Penghambat dan Pendukung

Dimensi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> – Keterlambatan penetapan dokumen perencanaan – Keterlambatan musyawarah Desa – Keterlambatan SPJ tahun lalu 	<ul style="list-style-type: none"> – Dana Desa yang besar – Dokumen Desa
Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya Kerjasama yang baik – Penumpukan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan Komunikasi dengan media sosial
Pengarahan	<ul style="list-style-type: none"> – Kondisi Desa (jalan, jaringan, waktu tempuh) – SDM aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> – Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangn Desa (Siskeudes)

Dimensi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Pengendalian Kegiatan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> – Pihak pengawas dan pemberdaya belum optimal – Partisipasi Masyarakat – Kurangnya komunikasi pihak pengelola, pengawas dan pemberdaya 	<ul style="list-style-type: none"> – Kerjasama pihak pengelola keuangan desa – Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

Sumber : Diolah Penulis 2024

Faktor Penghambat

1. Perencanaan

Berdasarkan data dari Dinas PMD perencanaan disebabkan karena belum diselesaikan dokumen SPJ tahun lalu sehingga dalam penetapan RKPDes mengalami hambatan. Sesuai dengan data dari dinas PMD menyatakan hingga bulan Mei 2023 masih ada 100 desa yang belum menyetor SPJ 2022 padahal batas pengumpulan SPJ adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Akhirnya perencanaan pengelolaan keuangan desa mengalami hambatan dan dana yang akan digunakan terlambat dicairkan.

2. Pengorganisasian

Dikarenakan belum berjalannya pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing perangkat. Hal ini perlu didukung dengan kerjasama yang baik antara desa dan perangkat desa. Berdasarkan ungkapan dari Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Bapak Ayub Alunpah menyatakan "kurangnya kerjasama antar perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa". Dari pernyataan di atas dapat dilihat kurangnya kerjasama akibatnya dokumen yang ditetapkan di desa mengalami hambatan dalam penyusunan.

3. Pengarahan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dihambat oleh kondisi desa. Dikarenakan luas Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sangat luas dengan kondisi jalan dan sarpras yang kurang mendukung akibatnya dalam proses pengelolaan keuangan desa mengalami hambatan dalam melakukan konsultasi ke pihak kecamatan dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kondisi internet yang kurang mendukung ini juga dapat memperlambat proses input lewat aplikasi sehingga memperlambat proses pengelolaan. Akibatnya mengalami keterlambatan.

4. Pengendalian kegiatan Keuangan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan menyatakan selain faktor internal adapun faktor eksternal yang menghambat pengelolaan keuangan desa. Salah satu penghambat adalah dari pihak pengawas dan pemberdayaan keuangan desa dimana harus lebih tepat dan tepat dalam membina serta mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Harus lebih diutamakan untuk menjawab kebutuhan bukan keinginan apalagi kepentingan.

Faktor Pendukung



Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes merupakan salah satu faktor pendukung pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan adanya bantuan aplikasi ini desa dapat terbantu dalam upaya peningkatan walaupun perlu dengan adanya pengetahuan dan bimbingan terkait aplikasi. Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini dibuat dalam rangka pengelolaan keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang ada di Desa. Selain ini pemerintah desa juga menggunakan aplikasi SIMDA yang dibuat pemerintah. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Bapak Chris Tlonaen Menyatakan bahwa, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil menggunakan aplikasi Siskeudes di semua Desa, meskipun jika dilihat jumlah Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah yang terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengoperasiannya sudah dapat dijalankan di semua Desa dan sedang diupayakan untuk ditingkatkan jaringan internet guna meningkatkan penggunaan aplikasi.

3.3 Upaya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Dengan aplikasi Siskeudes

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Bapak Chris Tlonaen menyatakan

meskipun jumlah desa kami banyak tapi kami mampu menjalankan aplikasi dan didukung dengan pihak desa yang dengan gesit ingin mempelajari penggunaan aplikasi Siskeudes. Harapannya agar ditingkatkan lagi untuk pemahaman mengenai aplikasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus memberikan dorongan kepada pemerintah desa guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang aplikasi.

Meskipun sudah berjalan di semua desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan namun perlu lagi untuk ditingkatkan lagi dalam pengelolaan.

2. Peningkatan Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka pekerjaan akan dengan mudah dapat diselesaikan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan para perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang ada di desa

3. Peningkatan Pengelolaan di Desa

Tabel 4 3

Upaya Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Dimensi	Upaya
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Turun langsung kelapangan dalam membina- Partisipasi Masyarakat
Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan sosial media (Grup WA, Surat Kabar)- Dokumen Desa
Pengarahan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pelaksanaan dan Penatausahaan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Pengendalian Kegiatan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kerjasama Pihak Pengelola Keuangan (Desa, Pendamping Desa, Dinas PMD, Inspektorat, BPK)- Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pelaporan dan pertanggungjawaban

Sumber : Diolah Penulis

Tabel diatas menunjukkan upaya pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan di kabupaten Timor Tenfah Selatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi juga dilakukan oleh pihak pengelola di Desa. dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa yang terpenting adanya peningkatan kerjasama dan komunikasi tidak hanya pihak pengelola saja tapi juga dilakuakan dengan pihak pihak pengawas dan pembina keuangan keuangan desa. peningkaktan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan peningkatan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam mengelolaa keuangan serta peningkatan kerjasama sam adan komunikasi daninformasi lewat media elektronik (Wa, Media, dan surat Kabar).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang sama dengan penlitian yang dilakukan oleh Mutia Basril (2020) , Faizah & Sari 2022, Afriansayah (2022), Ridwan (2019), Riswati (2018), dimana dalam pengelolaan keuangan diengaruhi oleh faktor internal pengelola keuangan dan SDM pihak pengelola keuangan . Penelitian ini juga juga mendapatkan hasil

bahwa pengelolaan keuangan desa sangat dibantu dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Penelitian yang dilakukan oleh penulis memperkuat hasil temuan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan kerja sama yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Layaknya penelitian yang dilakukan sebelumnya pengelolaan keuangan perlu melihat SDM yang ada pada pihak pengelola keuangan yang berhubungan langsung.

Berbeda dari penelitian sebelumnya peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan tidak hanya ditingkatkan pada pihak pengelola keuangan saja tapi harus mencakup pihak pengawas dan pembina. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Bapak Chris Tlonaen menyatakan "saya selalu menegaskan kepada tim PMD yang ikut aksistensi dan verifikasi dalam pengawasan agar memonitor motivasi pelaksana-pelaksana tingkat desa agar pengelolaan dana desa harus tepat asas dalam arti tepat aturan tepat sasaran dan juga tepat waktu kalau diluar itu resiko ditanggung sendiri, karena kami tidak hanya mengawal secara lisan saja tetapi kami ikut penegasan lewat surat resmi". Maka dalam pengelolaan keuangan perlu adanya kerja sama yang baik dan tepat sasaran demi pembangunan desa yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Pengelolaan keuangan desa di kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih perlu adanya peningkatan dari pihak desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari proses perencanaan yang menghasilkan dokumen RKPDes yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program satu tahun berjalan, selanjutnya proses pelaksanaan keuangan desa dengan bantuan aplikasi siskeudes, proses penatausahaan, proses pelaporan dan terakhir adalah proses pertanggungjawaban. Adapun Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan proses

pengelolaan keuangan desa. faktor penghambat yaitu dari segi perencanaan pengelolaan keuangan desa yang masih terhambat, kondisi desa yang masih belum mendukung, pihak pengelola keuangan desa dan kurangnya kerjasama pihak pengelola keuangan desa. faktor pendukung pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang membantu proses pengelolaan keuangan desa, dan pihak pengelola keuangan yang sudah mendukung serta SDM aparat desa yang sudah memadai.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang dilakukan juga tidak mendapat lebih banyak data tentang pengelolaan keuangan dikarenakan waktu yang terbatas sehingga hanya berfokus mengamati beberapa sampel desa dari 266 desa yang ada.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan keuangan dikarenakan pembangunan sekarang berfokus di pemerintah desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan dan penelitian yang dilakukan. Ucapan terimakasih ditujukan kepada Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timo Tengah Selatan beserta seluruh jajarannya, Kepala Desa Noemeto, Desa Kuatae, Desa Fatumnasi, Desa Nulle, Desa Mnelalete, Desa Kaeneno, Desa Kesenana beserta seluruh perangat yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang sangat berguna. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang selalu membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir terimakasih kepada Ibu Dr. Andi Fitri Rahmadany M. S.IP., M.Tr.IP yang selalu membimbing dan memberikan saran. Terutama kepada orangtua yang selalu mendukung serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Purba. (2021a). *Analisa Laporan Keuangan Untuk Teknik dan Ekonomi*.
- Purba. (2021b). *The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return Pn Assets. Indonesian Collage of Economics*.
- Riswati. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 13–31.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*.

B. Jurnal

- Atintyasputri, A. A. W. (2019). *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar*. 2. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Kecamatan Bengkalis Muhammad Luthfi Iznillah, di, Hasan, A., & Mutia, Y. (n.d.). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Media Riset ..., 2018 - ja.ejournal.unri.ac.id
- Jaya Bahwiyanti, A. S. (2020). Jieb : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5(November), 1–12. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>

- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Marga Ayu. *Ekonomi Dan Bisnis*. <http://eprints.walisongo.ac.id/9002/1>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Ridwan, M. A. (2019). Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Syariah*, 6(3), 198. repository.radenintan.ac.id
- Riswati. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 13–31. ejournal.ipdn.ac.id
- Purba. (2021b). *The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return Pn Assets*. *Indonesian Collage of Economics, Economic Education Journal*, 2021 - ejurnal.ung.ac.id

C. Website

- bpkp.co.id. curhat kab timor tengah selatan. Diakses 13 desember 2019, dari <https://www.bpkp.go.id/berita>
- Kupang.tribunnews.com. Kades dan sekdes mnelapetu tts ini tak patut dicontoh keduanya ternyata makan dana desa. Diakses 8 april 2020, dari <https://kupang.tribunnews.com>
- Kupang.tribunnews.com. tiga orang ditetapkan sebagai kasus dana desa taebone kab tts. Diakses 30 maret 2021, dari <https://kupang.tribunnews.com>
- Kupang.tribunnews.com. tim tangkap buron kejadi kab tts dalam dugaan korupsi dana desa. Diakses 12 oktober 2023, dari <https://kupang.tribunnews.com>
- suaratts.com. waduh hingga mei masih ada desa di tts yang belum cairkan dana desa <https://www.suaratts.com>